

## Peranan Guru PPKn Dalam Menanamkan Civic Virtue Peserta Didik Di SMA YP Unila Bandar Lampung

Yeti Novita Sari<sup>1</sup>, Hermi Yanzi<sup>2</sup>, Ana Mentari<sup>3</sup>

FKIP Unila Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 01 Bandar Lampung


E-mail: yetinovitasari99@gmail.com

**Abstract** - The purpose of the this study was to describe the role of civic education teachers in instilling the Civic Virtue in SMA YP Unila Bandar Lampung. The method used in this research was quantitative. The population in this study were 410 students with a sample 11 % that were 47 respondents. The sample chosen in this study was random sampling. The data were analyze by using the chi square formula. The collect the data, the researcher used questionnaires and supporting techniques using interviews and documentation. The results showed that a percentage of 0.66 % was in the strong category, it shows that the role of civic education teachers in instilling civic virtues of students at SMA YP Unila Bandar Lampung has a strong relationship and both have a strong relationship.

**Keywords** : The Role Of The Teacher, Civic Virtue

**Abstrak** - Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang peranan guru PPKn dalam menanamkan Civic Virtue peserta didik di SMA YP Unila Bandar Lampung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripsi kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 410 peserta didik dengan sampel diambil sebanyak 11% yaitu 47 responden. Sampel dalam penelitian ini yaitu random sampling. Analisis data menggunakan rumus chi kuadrat dan teknik pengumpulan data menggunakan angket dan teknik penunjang menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian diperoleh persentase sebesar 0,66 % berada pada kategori kuat, hal ini menunjukkan bahwa adanya peranan guru PPKn dalam menanamkan Civic Virtue peserta didik di SMA YP Unila Bandar Lampung memiliki keeratan yang kuat dan dapat dikatakan berperan.

**Kata kunci** : Peranan Guru, Civic Virtue

 © 2020 JIPS; published by Jurusan IPS, FKIP Unila.. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 License.

The article is published with Open Access at <http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/jips>

### 1. PENDAHULUAN

Tantangan pendidikan saat ini bukan hanya sekedar menuntut seorang guru menjadi pengajar yang dapat memfasilitasi peserta didik membangun pengetahuan tetapi guru juga diharapkan mampu membantu peserta didik dalam membentuk karakter, agar nantinya peserta didik mampu untuk menilai dan menyikapi segala sesuatu secara baik dan benar.

Perkembangan teknologi di era revolusi industri 4.0, menjadikan segala aktivitas seperti pembelajaran terintegrasi dengan teknologi digital (Tohir,2019). Kemajuan teknologi tersebut, memudahkan peserta didik mengumpulkan informasi dalam proses membangun pengetahuannya. Namun, penggunaan teknologi dalam pembelajaran tersebut, tidak dapat menggantikan peran guru dalam membantu pembentukan karakter peserta didik. Ketika pembelajaran hanya sebatas mentransfer ilmu pengetahuan dari guru kepada peserta didik di kelas, maka peran guru tersebut dapat tergantikan oleh teknologi. Tetapi peran guru dalam mendidik karakter, moral, dan memberikan keteladanan kepada peserta didik tidak dapat tergantikan oleh teknologi secanggih apapun. Hal ini sesuai dengan pernyataan Metha (2019), yang menyatakan bahwa peran guru tidak dapat tergantikan oleh teknologi sehebat apapun, karena teknologi tidak dapat menjadi fasilitator, inspirator, motivator, imajinasi, kreativitas, empati sosial, dan tim kerja serta pengembangan nilai-nilai karakter.

Pembentukan watak warga negara yang beradab, merupakan salah satu karakter yang harus dimiliki peserta didik sebagai warga negara yang baik. Peran lembaga formal dalam membentuk karakter warga negara yang ideal, terletak pada proses kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru sebagai tenaga pendidik dalam lembaga formal. Baik dalam proses pembelajaran seperti mengajar, memotivasi, membimbing dan menjadi fasilitator.

Tentunya melihat keadaan tersebut, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) hadir sebagai salah satu mata pelajaran yang didalamnya terdapat ajaran nilai dan moral yang dalam hal ini nilai dan moral dapat berperan aktif menyadarkan dan membentuk karakter peserta didik, sehingga menjadi warganegara yang baik dan cerdas (*good and smart citizen*).

Setelah melakukan penelitian di SMA YP Unila dengan melakukan wawancara kepada beberapa peserta didik dan observasi, terdapat tiga aspek yang menjadi sorotan dalam penelitian ini. Pertama terkait pentingnya peran guru dalam menanamkan *civic virtue* dalam diri peserta didik. Kedua peserta didik sendiri belum mengetahui apa yang dimaksud dengan *civic virtue* dan yang terakhir yaitu faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi sulitnya pembentukan *civic virtue* peserta didik.

Aspek pertama, mengenai pentingnya peran guru dalam menanamkan *civic virtue* peserta didik, dilihat dari hasil wawancara diketahui bahwa peserta didik belum mampu secara maksimal mengimplementasikan nilai – nilai karakter *civic virtue* dalam kehidupannya, sehingga menuntut guru untuk lebih menanamkan nilai – nilai karakter *civic virtue* tersebut dalam pembelajaran. Langkah awal yang dapat dilakukan oleh guru adalah mengembangkan nilai-nilai karakter dalam perangkat pembelajaran dan menanamkan nilai-nilai karakter dalam *design* pembelajaran tersebut untuk membentuk peserta didik yang memiliki *civic virtue* (Mariyani, 2018).

Berdasarkan temuan masalah terkait aspek yang pertama dapat disimpulkan bahwa optimalisasi peran guru PPKn yang maksimal akan menciptakan peserta didik yang memiliki sebuah adab yang ideal baik itu di lingkungan sekolah, keluarga, dan juga masyarakat dan juga visi misi dan tujuan dari PPKn akan dapat terwujud. Hal ini bisa berupa keberanian, ketabahan, keterampilan, semangat kewarganegaraan, dan lainnya. Karakter-karakter tersebut dapat diberikan melalui suatu pendidikan dengan tujuan membentuk warga negara yang ideal melalui peran guru PPKn.

Aspek kedua dari hasil wawancara ini yaitu peserta didik belum mengetahui apa yang dimaksud dengan *civic virtue* sehingga apabila dalam pembelajaran guru mengimplentasikan nilai – nilai karakter kepada peserta didik dalam proses pembelajaran, maupun interaksi di sekolah tetapi apabila peserta

didik belum mengetahui maksud dari penyampaian guru tersebut maka tujuan dari guru tersebut tidak akan tersampaikan karena peserta didik belum mengetahui apa yang dimaksud dengan *civic virtue*. Sehingga pemahaman yang kurang ini akan berdampak pada terhambatnya kemampuan peserta didik dalam mengembangkan (*civic disposition*) dan (*civic commitment*).

Aspek ketiga, terkait dengan faktor – faktor yang mempengaruhi sulitnya pembentukan *civic virtue* bagi peserta didik. Faktor pertama yaitu peserta didik lebih dominan mengejar nilai ketuntasan kemampuan kognitif saat pelajaran PPKn tanpa memperdulikan nilai sikap sosial dan karakter. Faktor kedua belum maksimalnya pengimplementasian contoh dalam kegiatan pembelajaran dan kehidupan sehari-hari. Faktor yang terakhir yaitu kurang optimalnya organisasi berbasis penguatkan karakter dan kegiatan gerakan sosial.

Berdasarkan uraian – uraian terkait peranan guru dan juga nilai – nilai kebajikan dalam diri peserta didik dalam hal sikap, moral dan juga pribadi yang mampu mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi maka berdasarkan latarbelakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Peranan Guru PPKn dalam Menanamkan *Civic Virtue* Peserta Didik di SMA YP Unila Bandar Lampung”

## **2 TINJAUAN PUSTAKA**

### **Tinjauan tentang Peranan Guru PPKn Dalam Menanamkan Civic Virtue**

#### **Pengertian Peranan**

Menurut Soejono Soekanto (2017:211), menjelaskan bahwa: Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan status”. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

### Peran Guru PPKn

Guru pendidikan pancasila dan kewarganegaraan (PPKn) memiliki tugas dan peran yang lebih dari guru mata pelajaran lain dikarenakan tanggung jawab guru PPKn bukan hanya mentransfer pengetahuan tetapi juga mentransfer nilai-nilai kebaikan, memberikan contoh teladan dan menjadikan peserta didik menjadi warga negara yang beradab.

Ada beberapa peran dan tugas guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ( PPKn ) seperti yang dikemukakan Amirudin dalam Widiandi ( 2017: 5 ) sebagai berikut:

- Menularkan pengetahuan dan kebudayaan kepada orang lain.
- Melatih keterampilan jasmani pada orang lain.
- Menanamkan nilai-nilai moral dan keyakinan kepada orang lain.
- Mampu dan dapat menguasai/mengembangkan materi-materi bahan ajarannya.
- Berkomunikasi dengan baik serta dapat bertanggung jawab.
- Dapat bekerja sama dengan lingkungan sekitarnya.

### Civic Virtue

Konsep *civic virtue* yang mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi sangat sejalan dengan amanat UUD NRI Tahun 1945 pada alenia ke 4 kehidupan masyarakat yang mengedepankan kepentingan umum akan memunculkan nilai – nilai demokrasi yang baik dan juga pengamalan nilai – nilai pancasila yang membentuk warga yang ideal. Elemen budaya kewargaan yang paling sentral dan perlu dikembangkan adalah kebajikan/akhlak kewargaan (*civic virtue*). Yang dimaksud adalah kemauan dari warga negara untuk menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi (...*the willingness of the citizen to set aside private interests and personal concerns for the sake of the common good*) (Quigley & Bahmueller, 1991). Tentang hal ini Quigley dan Bahmueller ( Arif :2017 ) meyakini bahwa kebajikan kewargaan merupakan domain psikososial individu yang secara substantif memiliki dua unsur, yaitu watak kewargaan (*civic disposition*) dan komitmen kewargaan (*civic commitment*).

1. *Civic Disposition*, sikap dan kebiasaan berpikir warga negara yang menopang berkembangnya fungsi sosial yang sehat dan jaminan kepentingan umum dari sistem demokrasi (...*those attitudes and habit of mind of the citizen that are conducive to the healthy functioning and common good of the democratic system*). Quigley & Bahmueller, 1991 ( Arif :2017 ).

Quigley 1991 ( Shelina, dkk: 2019 ) juga mengatakan bahwa secara konseptual, *civic disposition* meliputi sejumlah karakteristik kepribadian, yakni:

- Civility* atau keadaban (hormat pada orang lain dan partisipatif dalam kehidupan masyarakat);
- Individual responsibility* atau tanggungjawab individual;
- Self-discipline* atau disiplin diri;
- Civic-mindednes* atau kepekaan terhadap masalah kewargaan;
- Open-mindednes* (terbuka, skeptis, ambiguitas);
- Compromise* (prinsip konflik dan batas-batas kompromi);
- Toleration of diversity* atau toleransi atas keberagaman;
- Patience and persistence* atau kesabaran dan ketaatan;
- Compassion* atau keterharuan;
- Generosity* atau kemurahan hati, dan
- Loyalty to the nation and its principles* atau kesetiaan pada bangsa dan aturannya.

Kemudian Branson 1998 (Shelina, dkk :2019 ) menyatakan *civic disposition* merupakan sifat atau ciri dari karakter publik dan privat yang sangat penting untuk menjaga dan meningkatkan demokrasi. Seperti *civic skills* atau keterampilan kewarganegaraan, karakter kewarganegaraan ini berkembang secara perlahan dari waktu ke waktu dan sebagai hasil dari apa yang kita pelajari di rumah, sekolah, masyarakat, dan organisasi dalam masyarakat. Selanjutnya, ia mengemukakan ciri-ciri dari karakter privat (pribadi) dan karakter publik (kemasyarakatan) meliputi:

- Becoming an Independent Member of Society* (menjadi anggota masyarakat yang independen) Karakter ini merupakan kepatuhan secara sukarela terhadap peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang timbul dari perbuatannya serta menerima kewajiban moral dan legal dalam masyarakat demokratis.
- Assuming the Personal, Political, and Economic Responsibilities of a Citizen* (memenuhi tanggung jawab personal kewarganegaraan di bidang ekonomi dan politik) Yang termasuk karakter ini yaitu mengurus diri sendiri; memberi nafkah/menopang keluarga; merawat, mengurus dan mendidik anak; mengikuti informasi tentang isu-isu publik; memberi suara (voting); membayar

pajak; menjadi saksi pengadilan; memberikan pelayanan terhadap masyarakat; melakukan tugas kepemimpinan sesuai dengan bakat dan kemampuan sendiri/masing-masing.

3. *Respecting Individual Worth and Human Dignity* (Menghormati harkat dan martabat setiap individu) Yang termasuk karakter ini yaitu mendengarkan pendapat orang lain; berperilaku santun (sopan); menghargai hak dan kepentingan sesama warganegara; mematuhi prinsip aturan mayoritas, namun tetap menghargai hak minoritas untuk berbeda pendapat.
4. *Participating in Civic Affairs in a Thoughtful and Effective Manner* (berpartisipasi dalam urusan-urusan kewarganegaraan secara bijaksana dan efektif) Karakter ini menghendaki pemilikan informasi yang luas sebelum memberikan suara (voting) atau berpartisipasi dalam debat publik, keterlibatan dalam diskusi yang santun dan serius, dan memegang kendali kepemimpinan yang sesuai. Juga menghendaki kemampuan membuat evaluasi kapan saatnya kepentingan pribadi sebagai warga negara dikesampingkan demi kepentingan umum dan kapan seseorang karena kewajibannya atau prinsip-prinsip konstitusional untuk menolak tuntutan-tuntutan kewarganegaraan tertentu.
5. *Promoting the healthy functioning of constitutional democracy* (mengembangkan konstitusi demokrasi yang sehat) Karakter ini mengarahkan warganegara agar bekerja dengan cara-cara damai dan legal dalam rangka mengubah undang-undang yang dianggap tidak adil dan bijaksana. Yang termasuk dalam karakter ini antara lain sadar informasi dan kepekaan terhadap urusan-urusan publik; melakukan penelaahan terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip konstitusional; memonitor keputusan para pemimpin politik dan lembaga-lembaga publik dalam penerapan nilai-nilai dan prinsip-prinsip konstitusional dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila terdapat kekurangannya.
6. *Civic Commitment*, adalah atau komitmen warga negara yang bernalar dan diterima dengan sadar terhadap nilai dan prinsip demokrasi konstitusional (...*the freely-given, reasoned commitments of the citizen to the fundamental values and principles of constitutional democracy*). Quigley & Bahmueller, 1991: Arif: 2017 ). Menurut Quigley & Bahmueller, 1991: Wianto: 2019 ) Kesiediaan warga negara untuk

mengikatkan diri dengan sadar kepada ide dan prinsip serta nilai fundamental demokrasi konstitusional Amerika yang meliputi:

1. *Constitutional government* :Pemerintahan konstitusional
2. *The rule of law*: Prinsip negara hukum
3. *Separation of powers*: Pemisahan kekuasaan
4. *Checks and balances*: Kontrol dan penyeimbangan
5. *Minority rights*: Hak-hak minoritas
6. *Civilian control of the military*: Kontrol masyarakat terhadap militer
7. *Separation of church and state*: Pemisahan negara dan agama
8. *Power of the purse*: Kekuasaan anggaran belanja
9. *Federalism*: Federalism
10. *Common good*: Kepentingan umum
11. *Individual rights (life, liberty: personal, political, economic, and the pursuit of happiness)*: hak-hak individual yang mencakup hak hidup, hak kebebasan (pribadi, politik, ekonomi, dan kebahagiaan)
12. *Justice*: Keadilan
13. *Equality (political, legal, social, economic)*: Persamaan (dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi)
14. *Diversity*: Kebhinekaan
15. *Truth*: Kebenaran
16. *Patriotism*: Cinta tanah air

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sampel yang digunakan merupakan *random sampling* dan uji hipotesis menggunakan rumus *Chi Kuadrat*

#### Teknik Pengumpulan Data

##### Angket

Teknik pokok dalam penelitian ini adalah kuesioner/angket reponden penelitian yaitu peserta didik SMA YP Unila yang berjumlah 47 Orang. Angket yang akan digunakan adalah angket tertutup, yaitu item-item dari pertanyaan sudah disertai dengan alternatif jawaban yang harus dipilih oleh responden yang bersangkutan.

#### Uji Validitas dan Uji reliabilitas

##### Uji Validitas

Arikunto (2010: 211) mengemukakan bahwa, "validitas merupakan ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu

instrumen". Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Sebuah instrument dikatakan valid apabila dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Dalam penelitian ini untuk uji validitas menggunakan *logical validity* dengan cara "*expert judgement*".

### Uji Reliabilitas

Menurut Arikunto (2010:221) reabilitas adalah: Reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang baik tidak akan bersifat tendensius mengarahkan responden untuk memilih jawaban – jawaban tertentu.

Langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam upaya untuk menguji reliabilitas angket dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut.

- Mengadakan uji coba angket kepada 10 responden
- Dari hasil uji coba angket tersebut dikelompokkan ke dalam item ganjil genap.
- Hasil item ganjil dan genap dikorelasikan dengan rumus *Product Moment*.
- Kemudian untuk mengetahui reliabilitas angket digunakan rumus *Spearman Brown*

### Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. Dalam penelitian ini analisis data dilakukan setelah data terkumpul dengan mengidentifikasi data, menyeleksi dan selanjutnya dilakukan klasifikasi data kemudian menyusun data. Menurut Sudjana (2005:47) menentukan klasifikasi skor dengan menggunakan rumus interval, adapun tekniknya sebagai berikut:

- Untuk mengelola dan menganalisis data dengan menggunakan rumus interval (Nilai tinggi, sedang atau rendah) sebagai berikut :

$$I = \frac{NT - NR}{K}$$

- Kemudian untuk mengetahui tingkat persentase digunakan rumus sebagai berikut :

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

- Pengujian Hipotesis

$$x^2 = \sum_{i=j}^B \sum_{j=i}^k \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}$$

- Untuk menguji keeratan maka digunakan rumus kontigensi Sugiyono, (2014: 191) sebagai berikut :

$$C = \sqrt{\frac{x^2}{x^2 + n}}$$

- Kemudian Agar C diperoleh dapat dipakai untuk derajat asosiasi antara faktor-faktor diatas maka harga C dibandingkan koefisien maksimum yang biasa terjadi maka harga maksimum ini dapat dihitung dengan rumus :

$$C_{maks} = \sqrt{\frac{m-1}{m}}$$

- Kemudian untuk menentukan tingkat keeratan pengaruh, dengan langkah sebagai berikut :

$$E_{KAT} = \frac{C}{C_{maks}}$$

Kriteria uji sebagai berikut :

- Jika  $X^2$  hitung lebih besar atau sama dengan  $X^2$  tabel dengan taraf signifikan 5% maka hipotesis diterima
- Jika  $X^2$  hitung lebih kecil atau sama dengan  $X^2$  tabel dengan taraf signifikan 5% maka hipotesis diterima

## 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyajian data variabel Peranan Guru PPKn (X), didistribusikan dalam bentuk tabel sebagai berikut.

**Tabel 4.8 Distribusi Frekuensi Variabel Peranan Guru PPKn ( X )**

No.	Interval	Frekuensi	Persen-tase	Kategori
1	36 – 38	34	72,34%	Berperan
2	33 – 35	11	23,40%	Kurang Berperan
3	30 – 32	2	4,25%	Tidak Berperan
4	Jumlah	47	100%	

Sumber: Hasil Data Analisis Angket 2021

Tabel distribusi mengenai variabel Peranan Guru PPKn diatas menunjukkan bahwa peran guru dalam menanamkan *civic virtue* di SMA YP Unila yang terdiri dari tiga indikator yaitu inspirator, motivator, dan fasilitator dengan 12 item soal dan 3 alternatif jawaban. Berdasarkan hasil pengolahan data tentang

peran guru ( X ) adalah sebanyak 34 responden atau sekitar 72,34 % menyatakan berperan. Kemudian sebanyak 11 responden atau sekitar 23,40 % menyatakan kurang berperan. Kemudian sebanyak 2 responden atau sekitar 4,25 % menyatakan tidak berperan.

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut peran guru dalam menanamkan *civic virtue* peserta didik di SMA YP Unila berperan dengan baik. Dapat dikatakan berperan baik karena dalam meningkatkan minat pesereta didik SMA YP Unila, guru sudah menjalankan perannya dengan baik. Sebagai inspirator, motivator dan fasilitator guru membantu peserta didik menjadi lebih bersemangat dalam belajar khususnya dalam pelajaran PPKn. Dalam hal ini guru memberikan contoh atau teladan yang baik bagi peserta didik sehingga dapat melihat pelajaran PPKn yang dimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan melihat teladan guru dalam berinteraksi sehingga dapat dijadikan inspirasi oleh peserta didik untuk dapat mengamalkan materi PPKn yang sudah diajarkan. Peran guru sebagai pendidik merupakan peran-peran yang berkaitan dengan tugas - tugas memberi bantuan dan dorongan, tugas-tugas pengawasan dan pembinaan serta tugas - tugas yang berkaitan dengan mendisiplinkan anak agar anak itu menjadi patuh terhadap aturan-aturan sekolah dan norma hidup dalam keluarga dan masyarakat. Tugas-tugas ini berkaitan dengan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak untuk memperoleh pengalaman-pengalaman lebih lanjut. Oleh karena itu tugas guru dapat disebut pendidik dan pemeliharaan anak. Guru sebagai penanggung jawab pendisiplinan anak harus mengontrol setiap aktivitas anak-anak agar tingkah laku anak tidak menyimpang dengan norma-norma yang ada.

### Penyajian Data Variabel Civic Virtue (Y)

Penyajian data variabel *Civic Virtue* (Y), didistribusikan dalam bentuk tabel sebagai berikut.

**Tabel 4.14 Distribusi Frekuensi mengenai Variabel Civic Virtue (Y)**

No.	Interval	Frekuensi	Persentase	Kategori
1	23- 25	39	82,97%	Paham
2	20-22	6	12,76%	Cukup Paham
3	17-19	2	4,25%	Tidak Paham
4	Jumlah	47	100%	

Sumber: Analisis Hasil Data 2021

Tabel distribusi mengenai variabel *civic virtue* diatas menunjukkan bahwa peran guru dalam menanamkan

*civic virtue* di SMA YP Unila yang terdiri dari dua indikator yaitu *Civic Dispotition and Civic Commitment* dengan 8 item soal dan 3 alternatif jawaban. Berdasarkan hasil pengolahan data civic virtue ( Y ) adalah sebanyak 39 responden atau sekitar 82,97 % menyatakan paham. Kemudian sebanyak 6 responden atau sekitar 12,76 % menyatakan cukup paham. Kemudian sebanyak 2 responden atau sekitar 4,25 % menyatakan tidak paham. Hal ini sesuai dengan jawaban responden yang menyatakan bahwa peranan guru PPKn dalam menanamkan *Civic Virtue* bagi peserta didik mendapatkan pemahaman yang bagus, hal ini dibuktikan dengan pemahaman dan pengamalan dikehidupan sehari-hari seperti berani mengemukakan pendapat, bermusyawarah serta memiliki toleransi terhadap teman yang berbeda keyakinan, saling menolong sesama. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Nicollo Machiavelli ( Syifa: 2019) “ Fokus utama *Civic Virtue* yang menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi.”

### Pengujian Peranan GURU PPKn DALAM Menanamkan Civic Virtue Perserta Didik di SMA YP Unila Bandar Lampung

Dari hasil perhitungan, maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima dengan hasil  $\chi^2$  hitung = 20,64 kemudian dikonsultasikan dengan Chi Kuadrat pada taraf yang signifikan 5% (0,05) dan derajat kebebasan = 4 maka diperoleh  $\chi^2$  tabel = 9,49. Dengan demikian  $\chi^2$  hitung lebih besar dari  $\chi^2$  tabel ( $\chi^2$  hitung >  $\chi^2$  tabel), yaitu 20,64 > 9,49 yang berarti adanya Peranan Guru PPKn dalam Menanamkan Civic Virtue Peserta Didik di SMA YP Unila Bandar Lampung dimana guru dapat membentuk adab kewarganegaraan peserta didik dalam keseharian baik dilingkungan kelas, sekolah maupun dilingkungan masyarakat menjadi warga negara yang efektif, berwawasan luas dan bertanggungjawab dalam kehidupan sehari – hari.

### 5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dapat disimpulkan bahwa :

1. Guru sebagai kunci utama karena memegang perananan penting dalam memberikan keteladanan dan menanamkan nilai-nilai karakter yang tidak bisa digantikan dengan teknologi.
2. Peranan guru PPKn memiliki pengaruh terhadap

*Yeti Novita Sari, Hermi Yanzi, Ana Mentari*

*Peranan Guru PPKn Dalam Menanamkan Civic Virtue Peserta Didik Di SMA YP Unila Bandar Lampung*

penanaman moral, adab, sikap, dan menjadikan



warga negara yang cerdas dan berkarakter (*to be smart and good citizenship*).

3. Terdapat pengaruh yang signifikan dalam diri peserta didik terkait penanaman *civic virtue* yang diberikan oleh guru dalam kehidupan sehari-hari bagi peserta didik di SMA YP Unila. Guru PPKn berhasil dalam mengelola proses kegiatan belajar mengajar menjadi lebih bermakna dengan memberikan pendidikan sikap yaitu dengan cara berkerjasama, berani berpendapat serta menyelesaikan masalah dalam kelompok, dan juga memotivasi peserta didik belajar dan mengamalkan pembelajaran PPKn dengan pengalaman peserta didik. Selain itu, peserta didik telah mampu memahami peranannya sebagai warga negara yang baik dilingkungan sekolah maupun dilingkungan masyarakat. Contoh penerapan peranan dilingkungan sekolah yaitu sikap terbuka, pengendalian diri dan sikap saling menghargai dan menghormati seperti contohnya peserta didik telah mampu melaksanakan peraturan sekolah, mampu menyelesaikan masalah dengan bermusyawarah, menyanggah pendapat orang lain dengan santun, dan menerapkan sikap menghargai. Sedangkan penerapan peranan dilingkungan masyarakat yaitu saling tolong menolong dilingkungan masyarakat. Sehingga dengan demikian peranan guru PPKn dalam menanamkan *Civic Virtue* peserta didik di SMA YP Unila telah dilaksanakan dengan baik oleh peserta didik

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, M. Fachri. 2005. Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Pada Era Demokratisasi. *Demokrasi Vol. IV No.1 Th. 2005*.
- Arif, Dikdik Baehaqi. 2017. Pengembangan Kebajikan Kewargaan (Civic Virtue) dalam Masyarakat Multikultural Indonesia: Peran Pendidikan Kewarganegaraan. *Journal Civics & Social Studies Vol.1 No. 1*.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Juhji, 2016. Peran Urgen Guru Dalam Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan*. Vol.10 No.1 Tahun 2016
- Lubis, Mehta. 2019. Peran Guru Pada Era Pendidikan 4.0 . *Jurnal Pendidikan, Hukum dan Bisnis*. Vol 4 No 2 Tahun 2019
- Manizar, Elly.2015. *Peran Guru Sebagai Motivator Dalam Belajar*. Tadrib Vol. 1, No 2. Desember 2015
- Mariyani, 2018. *Peran Guru PKN dalam Pembentukan Karakter Warga Negara*. Literasi, Volume IX, No. 1 Tahun 2018
- Mulyono, Budi. 2017. Reorientasi civic disposition dalam kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan sebagai upaya membentuk warga negara yang ideal. *Jurnal Civics Volume 14 Nomor 2, Oktober 2017*.
- Neo, Wahyudin. 2013. *Peran Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (Pkn) Dalam Membangun Karakter Siswa*. Bekasi
- Nofijantie, Lilik. 2012. Peran Lembaga Pendidikan Formal Sebagai Modal Utama Membangun Karakter Siswa. *Conference Proceedings Annual International Conference On Islamic Studies (AICIS)XII: Surabaya*
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) Pasal 3 Pertiwi, Gita Rahmi. 2019. *Peran Guru Dalam Meningkatkan Minat Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan Terhadap Mata Pelajaran PPKn di SMK Negeri 7 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2018/2019*.Bandar Lampung.
- Saputa, Angga Yudana. (2014). *Peranan Karang Taruna Bangelan Putra Dalam Membina Kenakalan Remaja Di Desa Bagelan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Tahun 2014*. Bandar Lampung
- Soekanto,Soerjono. (2017). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Stamadova, Hermi, dan Yunisca. (2016). Peranan Tokoh Adat Dalam Mempertahankan Adat Tunggu Tubang Pada Masyarakat Semendo. *Jurnal Kultur Demokrasi*: Bandar Lampung
- Subagyo, Joko. 2011. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudjana. 2005. *Metoda Statistika*. Bandung: Tarsito.
- Sugiyono. 2002.*Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2017.*Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Shelina, N., Yanzi, H., & Mentari, A. (2019). Peran Pembelajaran PPKn dalam Membentuk Sikap Demokratis untuk Meningkatkan Civic Disposition Siswa. *Jurnal Kultur Demokrasi*, 8(2).
- Sutrisno, 2018. Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membangun Warga Negara Global. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 6 No 1*
- Syarifa, Syifa. 2019 . Konsep Civic Virtue Machiavelli Dan Pendidikan Kewarganegaraan Di Indonesia. *Jurnal konsep Civic Virtue dan Pendidikan Kewarganegaraan*. UNJ.
- Tohir, M. (2019). *Hasil PISA Indonesia Tahun 2018 Turun dibanding Tahun 2015 ( Issue December*



2019. <https://doi.org/10.31219/osf.io/pcjvx>.

Diakses tanggal 20 Mei 2020

Undang - Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen Bab I Pasal I

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional RI.

Wianto, Eko Pathi. 2009. *Studi Analisis Pembentukan Civic Virtue Dalam Ruang Lingkup Norma, Hukum Dan Peraturan Di SMP Negeri 1 Gemolong Tahun 2009*. Surakarta

Widianti, Nurul. (2017). *Peran guru PKn dalam menanggulangi dampak negatif tayangan televisi terhadap karakter siswa di SMP Gunungjati Kembaran tahun pelajaran 2015/2016*. Purwokerto Zurgobban, Zuhri 2016. *Pembinaan Keadaban Kewarganegaraan (Civic Virtue) Dalam Bidang Sosial Melalui Program Pendidikan Damai (Peace Education) Pada Komunitas Peace Generation di Kota Bandung* : Bandung.